

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Menurut Arriani Farah, dkk. menyebutkan bahwa:

Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di dalam kelas umum bersama teman-teman seusianya. Inklusi merupakan suatu proses merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran, budaya, dan masyarakat, serta mengurangi pengecualian dalam dan dari pendidikan. Hal ini melibatkan perubahan dan modifikasi dalam isis, pendekatan, struktur, dan strategi, dengan visi bersama yang mencakup semua anak dari rentang usia yang tepat dan pentingnya tanggung jawab dan pengaturan untuk mendidik semua anak. Penyelenggaraan pendidikan inklusif berarti menciptakan sebuah lingkungan agar peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain dan berinteraksi dengan semua anak. Setiap peserta didik berkebutuhan khusus memiliki program belajar secara individu yang memungkinkan dia mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan.¹⁰

Pendidikan inklusif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus yang sebelumnya sering terpinggirkan dalam sistem

¹⁰ Arriani Farah et al., "Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif," *Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi*, 2021, h. 3.

pendidikan. Melalui pendidikan inklusif, mereka diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya, dengan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan khusus yang mereka miliki. Hal ini tidak hanya memastikan akses yang setara bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi perkembangan mereka secara menyeluruh.

Menurut Stubbs di dalam buku Ni'matuzahroh dan Yuni Nurhamida menyatakan bahwa:

Pendidikan inklusif mengusung konsep integrasi dan penempatan di kelas reguler, namun dengan filosofi yang berbeda. Konsep ini menekankan bahwa sekolah harus menyediakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak dalam komunitas tersebut, tanpa memandang tingkat atau kemampuan mereka. Dalam pendidikan inklusif, semua anak, dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, kultural, dan emosional, baik fisik maupun nonfisik, dapat belajar bersama-sama sesuai dengan kebutuhan individu mereka masing-masing. Ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua peserta didik, mempromosikan kesetaraan akses terhadap pendidikan dan memperkuat konsep keberagaman dalam pembelajaran.¹¹

¹¹ Ni'matuzahroh and Yuni Nurhamida, *Individu Berkebutuhan Khusus Pendidikan Inklusif* (malang: univesitas muhamadiyah malang, 2016), h. 46.

Pendidikan inklusi merupakan konsekuensi dari kebijakan global "*Education for All*" (pendidikan untuk semua) yang diprakarsai oleh UNESCO pada tahun 1990, yang kemudian diperkuat oleh hasil konferensi dunia di Salamanca pada tanggal 7-10 Juni 1994. Langkah ini kemudian didukung oleh Deklarasi Dakar pada tahun 2000, yang memberikan kerangka kerja untuk merespons kebutuhan dasar seluruh warga masyarakat dengan menekankan bahwa pendidikan harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa memandang batas, ras, agama, atau potensi individu. Pendidikan inklusi ini sejalan dengan semangat pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, serta pasal 32 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai pendidikan khusus dan layanan khusus. Pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak berkebutuhan khusus didasarkan pada pernyataan dari Konferensi Salamanca tahun 1994, yang merupakan perluasan dari tujuan "*Education for All*" (EFA).

Menurut Sumiyati sebagaimana dikutip didalam buku hasmyati, dkk. menyatakan bahwa:

Pendidikan inklusif adalah model pelayanan pendidikan yang memberikan akses terbuka bagi semua peserta didik dan menyesuaikan diri dengan

segala kebutuhan mereka dengan cara yang tidak diskriminatif. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, diberikan bimbingan dan pelayanan yang sesuai, sambil tetap belajar bersama-sama dalam lingkungan yang inklusif.

Disisi lain menurut Ilahi di dalam buku hasmyati, dkk. Mengatakan bahwa:

Anak-anak dengan kebutuhan khusus harus diajarkan bersama-sama dengan anak-anak yang secara fisik normal melalui pendidikan inklusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan keterbukaan dan sikap saling menghargai terhadap individu yang memiliki keterbatasan fisik. Paradigma pendidikan inklusi dianggap sebagai langkah progresif dalam memajukan sistem pendidikan, dengan harapan dapat mengatasi salah satu masalah fundamental yang telah lama ada dalam pendidikan anak-anak dengan disabilitas. Melalui program pendidikan inklusi ini, diharapkan bahwa potensi yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus dapat dikembangkan, dan masa depan mereka dapat terselamatkan dari sistem diskriminasi yang telah ada serta mengatasi pandangan yang cenderung meremehkan hak-hak anak-anak dengan disabilitas. Hal ini menjadi upaya nyata untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang keadaan fisik atau kemampuan mereka.¹²

Menurut Mirna Sahrudin, dkk. Menyatakan bahwa:

¹² Hasmyati et al., *Pendidikan Inklusif* (sumatera barat: PT global eksekutif teknologi, 2022), h. 3-4.

Pendidikan inklusif merupakan implementasi dari prinsip pemerataan dan pendidikan tanpa diskriminasi, di mana anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Dalam pendidikan inklusif, semua anak berkebutuhan khusus diberikan kesempatan untuk menerima pendidikan yang setara di kelas biasa bersama teman-teman sebayanya. Lingkungan pendidikan inklusif dirancang untuk mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus, menciptakan suasana yang menyenangkan, ramah, dan membangun rasa percaya diri bagi siswa berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka. Pendidikan inklusif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, masyarakat, dan terutama orang tua. Dalam implementasinya, anak berkebutuhan khusus tidak diberikan perlakuan khusus atau hak istimewa, melainkan diperlakukan sama dengan peserta didik lainnya. Kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting dalam menjalankan pendidikan inklusif karena merupakan tantangan baru bagi sekolah dan masyarakat.

Melalui pendidikan inklusif, diharapkan generasi penerus dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan, serta menghindari terjadinya diskriminasi dalam masyarakat di masa depan. Pendidikan inklusif memberikan peluang bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi, sambil memberikan manfaat bagi anak-anak reguler dalam hal adaptasi dan sosialisasi dengan keanekaragaman yang ada. Selain itu, pendidikan inklusif juga memberikan pemahaman tentang toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan

kepada semua anak didik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan harmonis.¹³

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu layanan atau kebijakan yang ditujukan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tujuannya adalah memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak normal dalam satu ruangan. Pendekatan ini mengajarkan nilai-nilai penerimaan terhadap perbedaan dan menentang diskriminasi di antara sesama manusia. Selain itu, pendidikan inklusif juga bertujuan untuk memfasilitasi interaksi, sosialisasi, dan integrasi antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan teman sebaya, guru, orang tua, dan masyarakat. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan pendidikan inklusif memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensinya, sambil tetap memberikan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal.

2. Prinsip dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Menurut Emi Minarti dan Nouf Zahrah Anastasia menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, ada beberapa prinsip umum yang harus dipahami

¹³ Mirna Sahrudin, Novianti Djafri, and Arifin Sukung, "Pengelolaan Pendidikan Inklusif," *Jambura Journal of Education Management* 4, no. 1 (2023): h. 163-164.

oleh setiap penyelenggara pendidikan. Adapun prinsip tersebut sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pendidikan yang ramah adalah salah satu karakteristik penting dari pendidikan inklusif. Ini berarti menciptakan dan memelihara komunitas kelas yang ramah dan terbuka, yang menerima keberagaman dan menghargai perbedaan di antara siswa. Sekolah yang ramah juga berarti memberikan hak kepada setiap anak untuk belajar dan mengembangkan potensinya seoptimal mungkin dalam lingkungan yang aman dan terbuka. Selain itu, dalam konteks pendidikan inklusif, ramah juga mencakup sikap positif dan dukungan yang ditunjukkan oleh guru kepada semua peserta didik, tanpa terkecuali, dan tanpa menganggap anak-anak berkebutuhan khusus sebagai beban.
- 2) Pengembangan seoptimal mungkin: Setiap anak memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan harus berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi setiap anak.
- 3) Kerja sama: Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait, termasuk guru, staf sekolah, orang tua, ahli terapis, dan masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Perubahan sistem: Sekolah harus bersedia untuk menjadi fleksibel dalam implementasi pendidikan inklusif. Ini mungkin melibatkan modifikasi program pembelajaran, sistem penilaian, dan infrastruktur sekolah untuk

¹⁴ Erni Murniati and nouf zahrah Anastasia, "Pendidikan Inklusif Di Tingkat Sekolah Dasar: Konsep, Implementasi, Dan Strategi," *J D P*. 9, no. 1 (2016): h. 12-13.

memenuhi kebutuhan masing-masing anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menggabungkan layanan pendidikan khusus dan reguler dalam satu sistem persekolahan. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dari setiap peserta didik, termasuk anak-anak dengan berbagai tingkat kemampuan dan kebutuhan. Dengan pendekatan ini, sekolah berusaha menciptakan lingkungan belajar yang ramah, terbuka, dan inklusif bagi semua siswa, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya diskriminasi atau pemisahan berdasarkan kemampuan atau kebutuhan mereka.

3. Asumsi dalam Pendidikan Inklusif

Ada sejumlah asumsi yang melandasi pengembangan pendidikan inklusif. Menurut Puslitjaknov didalam buku Munawir Yusuf, dkk. Asumsi tersebut adalah:¹⁵

- 1) Semua Sekolah Mampu Menuju Pada Pendidikan Yang Lebih Inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan proses berkelanjutan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi partisipasi anak

¹⁵ Munawir Yusuf et al., *Pendidikan Inklusif Dan...* h. 164-165.

dalam pembelajaran. Ini bukanlah kondisi yang tetap, juga bukan program sekali jalan. Pendidikan inklusif relevan bagi semua anak, tidak hanya mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Sebuah sekolah tidak perlu diidentifikasi secara resmi sebagai penyelenggara pendidikan inklusif untuk menuju ke arah inklusif. Selama ada kemauan di komunitas sekolah untuk membantu semua anak berpartisipasi dalam pembelajaran, setiap sekolah dapat menuju ke arah inklusif. Meskipun mungkin langkah-langkah menuju inklusi akan lambat di sekolah-sekolah dengan sumber daya terbatas, namun tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali.

2) Tiada Rotan Akar Pun Jadi

Asumsi ini diterapkan karena pendidikan inklusif merupakan proses berkelanjutan dan setiap anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus berupaya untuk mengakomodasi perbedaan dan kebutuhan setiap anak tanpa menghiraukan keterbatasan sumber daya. Alasan keterbatasan sumber daya tidak bisa menjadi pembenaran untuk menolak anak-anak tersebut.

3) Kemauan Yang Kuat

Sumber daya manusia, terutama guru, merupakan faktor kunci dalam upaya menuju pendidikan yang lebih inklusif. Selama ada niat baik dari guru dan komunitas sekolah untuk membantu semua anak, keterbatasan sumber daya tidak akan menjadi hambatan yang signifikan dalam proses pembelajaran mereka. Guru dapat menggunakan berbagai strategi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dengan memanfaatkan sistem pendukung

yang ada, baik yang terkait dengan pemerintah, LSM, maupun lembaga internasional yang relevan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua sekolah harus memiliki kemampuan untuk menerapkan pendidikan inklusif agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak normal lainnya.

4. Karakteristik Pendidikan Inklusif

Karakteristik terpenting dari sekolah pendidikan inklusif adalah suatu komunitas yang kohesif. Menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual setiap murid. Untuk itu menurut sapon-shevin sebagaimana dikutip didalam buku budiyanto mengemukakan ada lima profil pembelajaran di sekolah inklusif:¹⁶

- 1) Pendidikan inklusif mengandung arti menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Guru memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kelas yang memperhatikan sepenuhnya kebutuhan semua anak, dengan mengedepankan suasana dan perilaku sosial yang menghargai perbedaan, termasuk kemampuan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, latar belakang suku, agama, dan sebagainya.

¹⁶ Budiyanto, *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal* (jakarta: prenadamedia gruop, 2017), h. 153-155.

- 2) Pendidikan inklusif melibatkan penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Mengajar di kelas inklusif memerlukan perubahan mendasar dalam kurikulum. Guru di kelas inklusif harus secara konsisten beralih dari pendekatan pembelajaran yang bersifat kaku dan terpaku pada buku teks atau materi dasar, menuju pembelajaran yang lebih kooperatif, tematik, berorientasi pada pemikiran kritis, pemecahan masalah, serta asesmen yang autentik.
- 3) Pendidikan inklusif berarti mempersiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum harus disertai dengan perubahan dalam metode pengajaran. Model kelas tradisional, di mana guru bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak, harus digantikan dengan model di mana siswa bekerja sama, saling mengajar, dan aktif berpartisipasi dalam pendidikan mereka sendiri dan teman-teman mereka. Hubungan antara pembelajaran kooperatif dan kelas inklusif menjadi jelas; semua anak berada dalam satu kelas bukan hanya untuk bersaing, tetapi juga untuk belajar bersama satu sama lain.
- 4) Pendidikan inklusif melibatkan penyediaan dukungan yang berkelanjutan bagi guru dan kelasnya, serta penghapusan hambatan-hambatan yang terkait dengan isolasi profesional. Meskipun guru selalu berinteraksi dengan orang lain, pekerjaan mengajar dapat menjadi pekerjaan yang sangat individualistik. Aspek utama dari pendidikan inklusif meliputi pengajaran dalam tim, kolaborasi dan konsultasi, serta berbagai cara untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, dan dukungan individu yang bertanggung jawab atas

pendidikan sekelompok anak. Kolaborasi dengan berbagai profesional, seperti terapis, konselor, dan lainnya, sangat diperlukan. Meskipun kerja sama memerlukan pelatihan dan dukungan, kerja sama yang diinginkan bisa terwujud.

- 5) Pendidikan inklusif juga mencakup keterlibatan orang tua secara signifikan dalam proses perencanaan pendidikan. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak mereka sangat penting dalam pendidikan inklusif, misalnya dalam penyusunan program pembelajaran individual.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik pendidikan inklusif meliputi kebutuhan untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kelas yang aman dan dapat disesuaikan, serta mendorong penerimaan terhadap perbedaan, keanekaragaman, dan tanpa diskriminasi. Guru juga diharapkan dapat memodifikasi kurikulum dan menggunakan metode pembelajaran yang tidak kaku, tidak hanya terpaku pada buku teks, sehingga membutuhkan kreativitas dalam setiap proses pembelajaran.

5. Tujuan Pendidikan Inklusif

Adapun tujuan pendidikan inklusif bisa teralisasi menurut Sumiyati dalam buku Hasmyati, dkk. Yakni sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Hasmyati et al., *Pendidikan Inklusif*, h. 4-5.

- 1) Menyediakan akses yang sebesar-besarnya bagi semua anak, termasuk anak-anak dengan disabilitas, agar hak-hak pendidikannya dapat dipenuhi secara layak.
- 2) Mencapai partisipasi dalam sistem pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kondisi, keahlian, dan kebutuhan individu siswa.
- 3) Membentuk individu yang memiliki kepedulian sosial dan menjadi bagian integral dari keluarga, masyarakat, serta bangsa.

Di lain sisi, Illahi di dalam buku Hasmyati, dkk menjelaskan jika:

Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan fisik, mental, sosial, dan emosional, serta anak-anak yang memiliki potensi bermutu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Tujuan lainnya adalah mewujudkan proses belajar yang tidak diskriminatif dan menghargai perbedaan di antara peserta didik.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi dari pendidikan inklusif adalah untuk menghargai dan menghormati keberagaman manusia, serta sebagai upaya melawan sikap diskriminatif dari lembaga pendidikan yang menolak anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk menerima pendidikan. Pendidikan inklusif bertujuan memberikan kesempatan yang adil dan menyeluruh bagi semua individu, dengan prinsip bahwa setiap perbedaan dihargai dan diterima.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif sangatlah beragam. Dari segi filosofis, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki hak dasar untuk memperoleh kehidupan yang layak di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Secara spesifik di lingkungan sekolah, pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan akses yang sama bagi semua anak tanpa terkecuali, sehingga mereka dapat mengembangkan bakat, minat, dan potensi mereka secara optimal sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sama dengan teman-teman mereka yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Dengan demikian, mereka dapat belajar dan berkembang tanpa adanya diskriminasi, yang pada gilirannya akan membantu mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat secara lebih percaya diri dan tanpa rasa malu atau takut. Selain itu, implementasi pendidikan inklusif juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan di masa depan.

6. Komponen Keberhasilan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif yang sukses bagi anak-anak berkebutuhan khusus memerlukan transformasi dari

paradigma hingga operasional. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami faktor-faktor apa yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Menurut Mohammad Takdir Ilahi ada beberapa komponen keberhasilan pendidikan inklusif, yaitu:¹⁸

a. Fleksibilitas Kurikulum (Bahan Ajar)

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam lembaga pendidikan formal yang mengatur isi pengajaran, mengarahkan proses pendidikan, dan menentukan kualitas pendidikan. Pentingnya keselarasan antara tujuan dan program yang tergambar dalam setiap kurikulum mencerminkan harmonisasi target pencapaian yang saling melengkapi.

Dalam konteks pendidikan inklusif, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum sekolah reguler yang dimodifikasi agar sesuai dengan tahap perkembangan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Modifikasi ini mempertimbangkan karakteristik dan tingkat kecerdasan mereka. Fokusnya adalah pada penyusunan model kurikulum yang memadai untuk menyesuaikan dengan beragam kemampuan anak dalam satu kelas yang sama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif umumnya sama dengan kurikulum yang digunakan di sekolah biasa.

¹⁸ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif Konsep...* h. 167-189.

Namun, modifikasi mungkin diperlukan agar kurikulum tersebut sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Modifikasi tersebut dapat berupa penggunaan metode pengajaran yang lebih inklusif, penyediaan dukungan tambahan seperti guru pendamping, atau penyesuaian bahan pelajaran agar dapat diakses oleh semua siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuan dari modifikasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kemampuan mereka.

b. Tenaga Pendidik (Guru)

Faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif yang tak kalah pentingnya adalah keberadaan tenaga pendidik yang profesional di bidangnya masing-masing untuk membimbing dan memberikan dukungan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Guru atau tenaga pendidik yang terlibat dalam proses pengajaran harus memenuhi kualifikasi yang ditetapkan, termasuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai terhadap materi yang akan diajarkan atau dilatihkan, serta memahami karakteristik siswa. Peran seorang guru sangat vital dalam mengatur seluruh proses pembelajaran dan perencanaan, serta melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam memahami setiap

materi pelajaran. Guru juga berfungsi sebagai motivator bagi anak-anak ketika mereka mengalami ketidakpercayaan atau frustrasi karena kesulitan memahami mata pelajaran. Dengan demikian, tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung, sehingga memungkinkan setiap anak berkebutuhan khusus untuk berkembang secara optimal dalam proses pendidikan.

Tugas seorang guru tidak hanya terbatas pada penyampaian materi pelajaran, tetapi juga mencakup membantu mengontrol suasana batin anak didik dan memfasilitasi mereka untuk mengoptimalkan potensi mereka demi meningkatkan prestasi. Selain itu, keberhasilan seorang guru juga bergantung pada sejumlah faktor kompetensi yang dimilikinya, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian kompetensi sosial, dan profesionalisme.

- 1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran peserta didik, yang mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian mencakup kepribadian yang stabil, dewasa, dan berwibawa, yang mampu menjadi panutan bagi peserta didik, serta memiliki akhlak yang mulia.
- 3) Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik dalam berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, rekan pendidik, orang tua siswa, dan masyarakat.

- 4) Kompetensi profesional mencakup penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru untuk membimbing peserta didik dalam memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Dengan kompetensi yang dimiliki, seorang guru mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai, memilih metode yang efektif, menggunakan media yang tepat, serta melakukan evaluasi secara komprehensif. Guru juga berperan sebagai contoh yang baik bagi siswa, oleh karena itu, mereka harus menunjukkan perilaku yang santun dan bijaksana. Profesionalisme juga menjadi hal yang penting bagi seorang guru, yang mencakup dedikasi terhadap profesinya serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perkembangan siswa. Selain itu, seorang guru dituntut untuk menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, termasuk siswa, rekan kerja, orang tua siswa, dan masyarakat. Kolaborasi yang kuat dan koordinasi yang baik antara semua pihak dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan.

Jadi, kesimpulannya adalah bahwa tenaga pendidik (guru) harus memiliki penguasaan pengetahuan, terutama tentang anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara menghadapinya, dan kemampuan menjadi motivator bagi mereka karena banyaknya anak yang mengalami

ketidakpercayaan diri, masalah emosional, dan kurangnya kendali diri. Peran guru sangat penting dalam membantu anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan potensi mereka. Oleh karena itu, guru harus memiliki empat kompetensi utama: kepribadian, profesionalisme, keahlian pedagogis, dan kemampuan sosial.

c. Input Peserta Didik

Kemampuan awal dan karakteristik siswa menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah inklusi. Peserta didik memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Dalam setiap pembelajaran, peserta didik diatur sedemikian rupa agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman. Di lembaga pendidikan inklusif, partisipasi aktif semua peserta didik dalam mengelola kegiatan pembelajaran sangat diutamakan guna menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan mendukung.

Jadi, input peserta didik dalam pendidikan inklusif adalah kemampuan dan karakteristik siswa yang menjadi landasan untuk merancang kurikulum dan materi pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Diharapkan semua peserta didik, tanpa terkecuali, aktif berpartisipasi

dalam kegiatan sekolah untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing.

d. Lingkungan Dan Penyelenggaraan Sekolah Inklusif

Banyak faktor pendukung yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan dalam pendidikan inklusif. Dalam konteks sistem dukungan, beberapa peran kunci dimainkan oleh orang tua, sekolah khusus, dan pemerintah. Komponen lingkungan sekitar juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk berkomunikasi dan berkonsultasi secara aktif tentang perkembangan anak serta untuk berkolaborasi dalam mengatasi hambatan belajar yang mungkin dihadapi anak mereka. Mereka juga dapat mendukung pengembangan potensi anak melalui program-program di luar lingkungan sekolah.

Pemerintah memainkan peran penting dalam menentukan pelaksanaan pendidikan inklusif dengan merumuskan kebijakan internal sekolah, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan khusus, menyediakan guru khusus, memberikan subsidi untuk pengadaan media, alat, dan sarana khusus yang dibutuhkan sekolah, serta menyelenggarakan program pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pendidikan inklusif.luas.

Jadi, kesimpulannya adalah lingkungan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor seperti peran orang tua, sekolah, guru, dan dukungan pemerintah sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi pendidikan inklusif.

e. Sarana Prasarana

Sarana prasarana memiliki peran krusial dalam kesuksesan pendidikan inklusif. Sarana prasarana merupakan alat strategis yang membantu kelancaran setiap aktivitas. Infrastruktur pendidikan mencakup semua perangkat yang mendukung kelangsungan proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan, infrastruktur meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang Bimbingan dan Konseling (BK), serta fasilitas multimedia.

Jadi Sarana dan prasarana adalah perangkat atau fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif untuk mendukung kebutuhan siswa di sekolah tersebut.

f. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi digunakan untuk memberikan nilai pada objek yang dievaluasi, sehingga manfaat atau nilai intrinsiknya dapat disampaikan kepada orang lain. Di sekolah, evaluasi biasanya dilakukan melalui ulangan harian, ulangan umum, dan ujian akhir. Evaluasi tersebut sering kali dilakukan secara serentak dengan soal yang seragam untuk

semua siswa, asumsinya bahwa siswa dalam satu kelas memiliki kemampuan yang serupa. Namun, untuk siswa dengan kebutuhan khusus, jenis evaluasi harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kecerdasan mereka agar dapat menerima materi pelajaran dengan baik.

Jadi evaluasi pembelajaran dalam pendidikan inklusif adalah proses penilaian dan perbaikan hasil belajar yang dilakukan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, yang harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan kecerdasannya.

7. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif

Kebijakan pendidikan inklusif mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Untuk memenuhi amanah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Bab IV pasal 5 ayat 2,3, dan 4 dan pasal 32 yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial) atau peserta didik

yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah.

Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, dapat di tandai dengan lahirnya Undang-undang sebagai berikut:¹⁹

- 1) UU No. 23 tahun 2002. Pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Pasal 48 pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Dalam UU ini pun semakin memperjelas bagaimana seorang anak mendapatkan hak yang sama baik dalam hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, mendapatkan perlindungan seperti yang dinyatakan dalam pasal 1 sampai pasal 2 maupun mendapatkan pendidikan yang sesuai minat dan bakatnya seperti yang terdapat pada pasal 9.
- 2) UU NO 20 tahun 2003 pasal 5, ayat 1 sampai 4, tentang sistem pendidikan nasional yaitu:
 - a) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu
 - b) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

¹⁹ Roan Ardika and Muhammad Syaifudin, “Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Sekolah Inklusif,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 8 (2023): h. 6-7.

- c) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
 - d) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus
 - e) Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- 3) Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan “Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Bengkulu Alam Mahira” dengan masalah yang diteliti sebelumnya, dilakukan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. K. Sri Kusuma Wardani, dkk.²⁰ (2020). Dengan judul “Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN 20 Mataram”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di SDN 20 Mataram, mereka menerapkan Kurikulum 2013. Namun, beberapa

²⁰ K. Sri Kusuma Wardani et al., “Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SDN 20 Mataram,” *Progres Pendidikan* 1, no. 2 (2020).

peserta didik berkebutuhan khusus menghadapi kesulitan dalam mengikuti materi di kelas reguler. Untuk mengatasi masalah ini, guru pendamping menciptakan kurikulum modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

Proses pembelajaran di SDN 20 Mataram dilakukan melalui model kelas reguler di mana siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa reguler dalam satu kelas. Namun, dalam situasi tertentu, siswa inklusif dipindahkan ke ruang sumber inklusif oleh guru pembimbing khusus. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa beberapa siswa inklusif masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan siswa reguler.

Persamaan: Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pendidikan inklusif di SD dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Perbedaan: Penelitian terdahulu ini menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan program pendidikan inklusif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah bagaimana implementasi pendidikan inklusif.

2. Tryas Wardani Nurwan.²¹ (2019). Dengan Judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 33 Payakumbuh berjalan dengan baik. Sekolah ini mampu memberikan alternatif layanan kepada siswa inklusif dengan dukungan jumlah guru yang memadai dan suasana pembelajaran yang saling mendukung. Dari segi komunikasi, implementasi sekolah inklusif di SD Negeri 33 Payakumbuh dianggap berhasil antar sekolah dan orang tua. Tetapi komunikasi antara dinas pendidikan kota payakumbuh dan dinas pendidikan provinsi sumatera barat perlu ditingkatkan agar pihak sekolah dapat berkomunikasi karena pihak sekolah bisa dikatakan kebingungan mengenai kewenangan dan koordinasi mengenai pendidikan inklusif.

Persamaan: penelitian ini sama-sama meneliti tentang pendidikan inklusif di SD dan sama-sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Perbedaan: penelitian terdahulu ini meneliti tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah bagaimana implementasi pendidikan inklusif.

²¹ Tryas Wardani Nurwan, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar,” *Journal of Education on Social Science* 3, no. 2 (2019).

3. Tridiwa Arief Sulistyو.²² (2017). Dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum secara khusus mengakomodasi aksesibilitas bagi mahasiswa difabel untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang inklusif dan ramah terhadap mahasiswa difabel. Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta masih jauh dari ideal dalam menciptakan lingkungan kampus yang ramah terhadap mahasiswa difabel. Meskipun UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkuliah umum, namun layanan dan aksesibilitas dalam proses perkuliahan masih belum memadai untuk memberikan lingkungan belajar yang ramah terhadap mahasiswa difabel. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai kendala yang dihadapi mahasiswa dalam aspek akademis maupun sosial.

Persamaan: penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama meneliti tentang

²² Tridiwa Arief Sulistyو, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Mahasiswa Difabel Di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.” (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35271/1/TRIDIWA-ARIEF-SULISTYO-FDK.pdf>.

pendidikan inklusif dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Perbedaan: penelitian terdahulu ini meneliti tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif di universitas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah bagaimana implementasi pendidikan inklusif di sekolah dasar.

4. Anggun Lasmining Sari.²³ (2016) Dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Pada Kelas IV Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (Studi Kasus SDN 20 Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017)”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas IV harus mematuhi prinsip pendidikan inklusif, termasuk perencanaan, implementasi, evaluasi, hambatan, solusi, serta fasilitas pembelajaran yang sesuai. Di SDN 20 Mataram, pembuatan RPP belum optimal karena hanya ada satu RPP untuk siswa biasa, sementara siswa berkebutuhan khusus belum memiliki RPP khusus. Implementasi pembelajaran juga belum maksimal karena ketidaksesuaian antara cara guru mengajar sehari-hari dengan RPP, metode yang tidak sesuai dengan RPP, kurangnya variasi dalam metode pengajaran, dan

²³ Anggun Lasmining Sari, “Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Pada Kelas IV Di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (Studi Kasus SDN 20 Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017)” (institut agama islam negeri mataram, 2016), http://etheses.uinmataram.ac.id/612/1/Anggun_Lasmining_Sari_151126095.pdf.

kurangnya fasilitas pembelajaran seperti media pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran juga tidak konsisten antara siswa biasa dan siswa berkebutuhan khusus, dengan penyesuaian yang diperlukan untuk siswa berkebutuhan khusus.

Persamaan: penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama meneliti tentang pendidikan inklusif di SD dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

Perbedaan: penelitian terdahulu ini meneliti tentang implementasi kebijakan pendidikan inklusif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ialah implementasi pendidikan inklusif.

C. Kerangka Berpikir

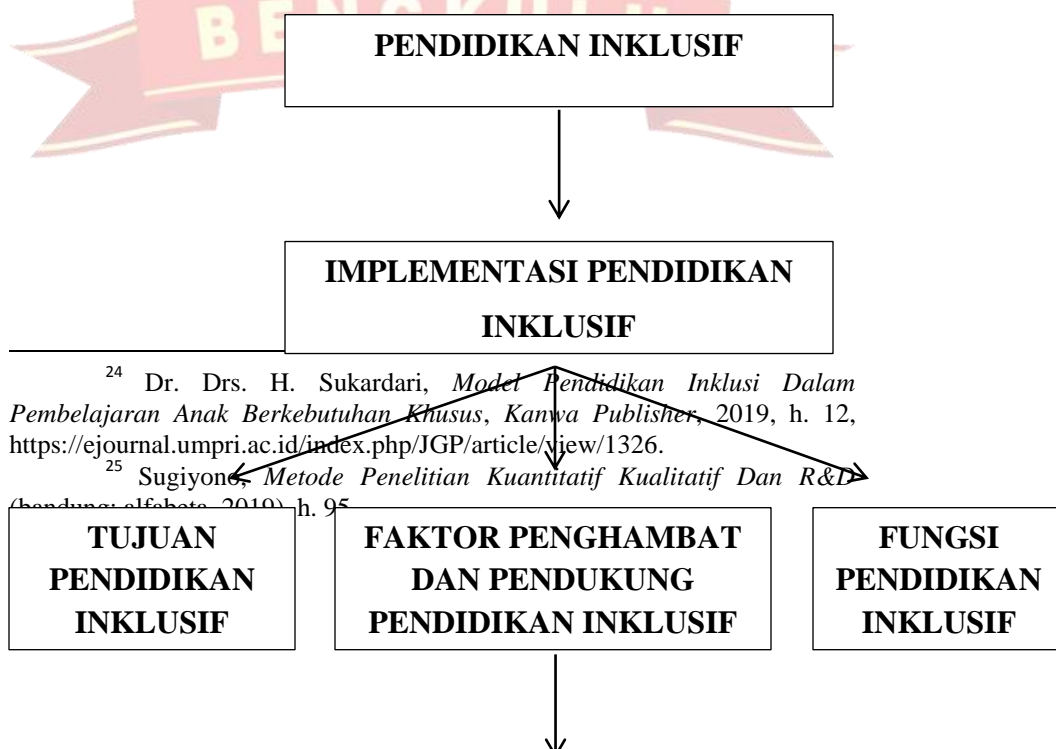
Menurut Nasichin sebagaimana di kutip pada buku Sukadari, mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah Proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengatasi tantangan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah umum (regular), dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memberi mereka kesempatan persiapan dalam menjalani kehidupan masyarakat. Pendidikan inklusi menekankan pada peninjauan

ulang dan penyesuaian sistem pendidikan agar cocok bagi setiap siswa.²⁴

Menurut uma sekaran sebagaimana di kutip pada buku sugiyono, menjelaskan bahwa kerangka berpikir adalah konseptualisasi tentang bagaimana teori terkait dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang signifikan.²⁵ Fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan inklusif di Sekolah Alam Bengkulu Mahira.

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



²⁴ Dr. Drs. H. Sukardari, *Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*, Kanwa Publisher, 2019, h. 12, <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/JGP/article/view/1326>.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 95.